

# LAPORAN AKHIR PENELITIAN TERAPAN



## MODEL PENGANGGARAN EMPATIK (*EMPHATIC BUDGETING MODEL*): STUDI PADA PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

**TIM PENGUSUL**  
**Oktavianus Pasoloran**  
**Lisa Kurniasari Wibisono**

**Universitas Kristen Indonesia Toraja**  
**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN TERAPAN**

Judul Penelitian : Model Penganggaran Empatik (*Emphatic Budgeting Model*):  
Studi Pada Penganggaran Daerah Kabupaten Tana Toraja

**Ketua**

- a. Nama Lengkap : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
- b. NIDN : 0926106801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Akuntansi
- e. Nomor HP : 081355619844
- f. Alamat Email : [pasolorano@gmail.com](mailto:pasolorano@gmail.com)

**Anggota 1**

- a. Nama Lengkap : Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.
- b. NIDN : 0910128901
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Nomor HP : 08111085208
- e. Program Studi : Manajemen
- f. Alamat Email : [lisakurniasariwibisono@gmail.com](mailto:lisakurniasariwibisono@gmail.com)


**Anggota Peneliti Mahasiswa**

No	Nama Lengkap	NIDN/NIK	Fakultas/Program Studi	Alamat Email
1	Surianti Mutia	221411313	Ekonomi/ Manajemen	mutia12@gmail.com
2	Heng Li Ling	221411414	Ekonomi/ Manajemen	heng_li@gmail.com
3	Alfriani Tandi Datu	221411157	Ekonomi/ Manajemen	datu.alfriani@gmail.com

**Jumlah Dana Penelitian : Rp80.000.000,-**

Makale, 8 Juli 2022

Mengetahui  
Dekan Fakultas  
  
(Dr. Ferdy Karuru, M.Pd)  
NIDN: 0925126201

Ketua Peneliti,  
  
(Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.)  
NIDN: 0926106801

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

---

1. Judul Penelitian: Model Penganggaran Empatik (*Emphatic Budgeting Model*): Studi i Pada Penganggaran Daerah Kabupaten Tana Toraja)

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Dr. Oktavianus Pasoloran,SE,M.Si,Ak,CA	Ketua	Akuntansi Sektor Publik	10
2	Kurniasari Wibisono	Anggota	Manajemen	10

3. Objek Penelitian: Penganggaran daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan : Januari tahun 2022  
Berakhir : bulan : Desember tahun 2022

5. Usulan Biaya

- Tahunke-1 : Rp. 80.000.000,-

6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Tana Toraja

7. Instansi lain yang terlibat: Pemda, DPRD Kabuapten Tana Toraja dan LSM

8. Temuan yang ditargetkan :

- a. Konstruksi tema penganggaran empatik berdasarkan pengembangan konsep altruisme menggunakan paradigma kualitatif (interpretif) dengan pendekatan fenomenologi melalui; (1) analisis mikro untuk memperoleh pemahaman melalui wawancara mendalam dengan masyarakat dan aktor anggaran daerah, (2) analisis makro untuk memperoleh pemahaman realitas sosiopolitik dan institusi yang terkait dengan aspek narsisisme dan altruisme dalam penganggaran daerah.
- b. Model empatik dalam penganggaran daerah. Pada tahap ini, penelitian mengidentifikasi aspek-aspek empatik dalam pengangaan daerah dengan menggunakan *content analysis* dan mendesain instrumen yang berhubungan dengan dimensi dan indikator empatik.

9. Kontribusi yang ditargetkan adalah :

Pada tataran teoritis, pengembangan konsep narsisisme dan altruisme dalam penelitian ini dapat menjadi gagasan teoritis baru dalam memahami orientasi anggaran daerah. Penganggaran daerah selama ini dalam realitasnya sebagian besar untuk belanja pegawai dan masih tingginya penyalagunaan dana-dana yang mengatasamakan masyarakat. Melalui penelitian ini dapat menghasilkan model penganggaran empatik yang didorong oleh motivasi altruistik dan menjadi sebuah hasil konstruksi sosial yang sarat nilai, memberdayakan, emansipatoris, dan bahwa penganggaran daerah didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran publikasi artikel adalah jurnal Bereputasi Internasional. *Devotion: Journal of Research and Community Service* Volume 3 Issue 13 Tahun 2022

11. Rencana Luaran akhir adalah Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik, yaitu Model Penganggaran Empatik pada Pemerintah Daerah. Direncanakan dapat terbit pada tahun 2023.

## DAFTAR ISI

ISI	HAL
HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. LatarBelakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	2
1.3. TujuanKhusus .....	2
1.4. Urgensi Penelitian.....	2
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Narsisisme: <i>Lack of Emphaty</i> .....	4
2.2. Konsep Altrulisme .....	5
2.3. Politik Penganggaran Daerah: Ruang dan Akses Kepentingan Masyarakat.....	6
2.4. Studi Pendahuluan .....	7
2.5. Peta Jalan Penelitian .....	8
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	9
3.2. Pelaksanaan Kegiatan .....	9
3.1. Kerangka Alur Penelitian.....	11
<b>BAB 4. BIAYA DAN JADUAL PENELITIAN</b>	
4.1. Anggaran Biaya .....	12
4.2. Jadwal Pelaksanaan.....	12
DAFTAR PUSTAKA .....	13
LAMPIRAN Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti .....	

## RINGKASAN

Penganggaran daerah bukan hanya sekedar angka namun media yang dapat digunakan untuk melegitimasi keberadaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dan menunjukkan perilaku aktor anggaran daerah. Ketika penganggaran daerah tidak dapat menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, para politisi dan birokrat akan berupaya untuk mempengaruhi persepsi masyarakat dengan membentuk citra seolah-olah mereka telah menjalankan amanah yang dipercayakan oleh *voters* (masyarakat). Penganggaran daerah, dengan demikian memiliki potensi untuk menonjolkan “*hall of mirror*”. Sikap untuk membentuk citra positif tidak dapat dipisahkan dari perilaku narsisis. Anggaran daerah yang mengandalkan dana perimbangan, besarnya belanja pegawai, dan tingginya korupsi atas dana yang mengatasnamakan masyarakat menyebabkan orientasi anggaran daerah sulit untuk menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah dalam penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan dan menerapkan model penganggaran empatik (*emphatic budgeting models*) yang dibangun melalui konsep altruisme. Dengan model ini anggaran daerah dibangun menjadi sebuah hasil konstruksi sosial yang sarat nilai, memberdayakan, emansipatoris, dan bahwa penganggaran daerah didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan konsep narsisisme dan altruisme dalam penelitian ini dapat menjadi gagasan teoritis baru dan determinan penting dalam memahami orientasi dan perilaku dalam penganggaran daerah.

Secara khusus, target penelitian ini adalah; (1) melakukan konstruksi tema penganggaran empatik berdasarkan pengembangan konsep narsisisme dan altruisme dengan menggunakan paradigma kualitatif (studi interpretif) dengan pendekatan fenomenologi melalui analisis mikro untuk memperoleh pemaknaan dan pemahaman melalui wawancara mendalam dengan masyarakat dan aktor anggaran daerah, dan analisis makro untuk memperoleh pemahaman realitas sosiopolitik dan institusi yang terkait dengan aspek narsisisme dan altruisme dalam penganggaran daerah, (2) Membangun model penganggaran empatik. Pada tahap ini, target penelitian adalah mendesain instrumen yang berhubungan dengan dimensi dan indikator empatik dalam penganggaran daerah dan mengidentifikasi aspek-aspek empatik dalam penganggaran daerah dengan menggunakan metode *content analysis*. Situs penelitian ini pada penganggaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran publikasi artikel adalah jurnal Bereputasi Internasional *International Journal of Accounting and Business Society* . Rencana Luaran akhir adalah Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik, Model Penganggaran Empatik pada Pemerintah Daerah. Direncanakan dapat terbit pada tahun 2023.

Kata Kunci: penganggaran daerah, empatik, narsisisme, altruisme

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada sektor publik, penganggaran daerah memiliki dimensi yang luas, yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk membentuk narsisisme. Lutus (2007), menyatakan bahwa salah satu pemasok utama narsisisme sosial adalah pemerintah. Narsisisme pemerintah (*government narcissism*) berhubungan dengan bagaimana memanfaatkan masyarakat sesuai apa yang mereka butuhkan. Kadang-kadang seseorang masuk ke pemerintah dengan ide-ide tentang peran dan keterbatasan, kemudian membuat program dan anggaran berdasarkan narsisisme pribadi yang bertentangan dengan sentimen publik. Namun, kesalahan seperti ini dianggap umum, karena biasanya masyarakat cepat melupakan kesalahan tersebut. Kegagalan narsisisme sosial ditunjukkan oleh ketidakmampuan kebijakan pemerintah melawan naluri dari masyarakat umum. Pemerintah berhasil menarik narsisisme kolektif publik sementara secara pribadi hanya bertindak pada tingkat kepedulian (Lutus, 2007).

Penyusunan program dan anggaran publik merupakan produk dari pertarungan kepentingan. Meskipun semua usaha untuk merasionalisasi proses anggaran, karakteristik penganggaran publik adalah sesuatu yang menjadi aktivitas politik. Perubahan program-program pemerintah, peralihan kepentingan yang berhubungan dengan keputusan kebijakan dan berbagai aktor yang berbeda adalah bagian dari proses penganggaran. Proses penganggaran publik digambarkan sebagai situasi “penganggaran dalam lingkungan negosiasi, persuasi, tawar-menawar dan gertakan” (Caiden, 1985,). Inilah yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan untuk memperjuangkan anggaran, seperti anggaran *pro gender* serta *pro poor*. Proses dan mekanisme penyusunan anggaran sebagai salah satu realitas sosial mestinya menjadi salah satu indikator respon negara atau daerah dalam memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh akses yang layak secara sosial ekonomi.

Fakta menunjukkan bahwa dana-dana yang mengatasnamakan kebutuhan masyarakat dan kepentingan sosial menjadi salah satu sumber “banjakan” aktor anggaran, seperti dugaan penyalagunaan dana aspirasi di Kabupaten Jeneponto mencapai Rp55 miliar periode tahun 2012 (Tribunnews.Com). Kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 (BPK, 2009). Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* menunjukkan kuatnya dugaan terjadinya desentralisasi korupsi, pemerintah daerah merupakan instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi (ICW, 2014). Menurut Elisheva (2004), politisi sering memanfaatkan kata “pemberdayaan” sebagai slogan politik, dan

karenanya klise. Bahasa “janji” yang digunakan untuk tujuan politik akan tercapai dengan membangun pengalaman masyarakat sebagai subjektivitas aktor politik.

Memperjuangkan aspirasi masyarakat harus didasarkan pada motivasi untuk menolong masyarakat sebagai bagian dari perilaku prososial yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat luas. Dalam pengertian Batson (1997), sebagai “*motivational state*” yang memiliki kekuatan psikologis untuk mengarahkan tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Aktor anggaran yang terlibat dalam proses penganggaran daerah harus memiliki empati “*feeling in*” yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam kondisi emosional (perasaan) masyarakat melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi masyarakat. *Empathic concern* mampu menghasilkan sensitivitas yang lebih besar terhadap orang lain dalam menghasilkan motivasi altruistik. *Empathic concern* dapat membangkitkan motivasi untuk memberikan pertolongan secara tulus yang hanya berorientasi kepada kesejahteraan, kebaikan, dan kemaslahatan orang lain atau masyarakat luas (Taufik, 2012). Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi luas dalam pengembangan penelitian akuntansi sektor publik khususnya penganggaran daerah untuk mengamati berbagai aspek nilai dalam konteks sosiopolitik dan institusi dibalik kebijakan yang diproduksi dalam penganggaran daerah.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pemaknaan orientasi masyarakat dalam penganggaran daerah. Kedua adalah bagaimana relasi sosiopolitik dan institusi dalam anggaran daerah?. Ketiga adalah bagaimana konstruksi tema penganggaran empatik dalam membangun model penganggaran daerah yang memberdayakan dan emansipatoris?

## **1.3. Tujuan Khusus**

Tujuan penelitian ini adalah membangun model penganggaran daerah empatik yang memberdayakan dan emansipatoris sebagai wujud dari tujuan politik anggaran daerah yang menempatkan masyarakat sebagai sentral dari penganggaran daerah.

## **1.4. Urgensi Penelitian**

Secara teoritis, penelitian dengan menggunakan narsisme dan altruisme dapat menjadi determinan penting dalam penelitian perilaku penganggaran daerah dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori dalam penelitian sektor publik. Hasil penelitian pada tahap



pertama menjadi referensi untuk tahap selanjutnya dalam membangun tema-tema yang berhubungan dengan konteks empatik dalam penganggaran daerah.

Model penganggaran empatik (*emphatic budgeting models*) dapat menjadi sebuah alternatif yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebijakan anggaran yang berorientasi pada masyarakat. Sistem penganggaran pada pemerintah daerah yang berbasis kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) selama ini masih sangat terbatas baik pada tataran konseptual maupun implementasinya. Indikator kinerja anggaran yang digunakan masih berorientasi pada pengukuran output. Idielnya kinerja anggaran dapat diukur pada tingkat *outcome*/hasil dan dampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian model penganggaran empatik diharapkan dapat memberikan implikasi luas dalam memahami orientasi masyarakat dalam penganggaran daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Narsisisme: *Lack of Emphaty*

Istilah narsistik pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil tokoh Narcissus dalam mitos Yunani. Narcissus adalah seorang pemuda yang diramalkan akan hidup umur panjang. Namun, Narcissus telah membuat marah para dewa, karena menolak cinta Echo. Saat ia membungkuk untuk minum air pada sebuah kolam, Narcissus melihat bayangannya dan langsung jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Setiap kali dia menggenggam gambar itu, gambar itu menghilang. Selama sehari-hari dia duduk di kolam renang, sekarat, menangis putus asa, dia tidak mampu merangkul cinta akan dirinya sendiri (Chatterjee dan Hambrick, 2006). Itulah sebabnya, kata narsis menggambarkan seseorang yang terlalu mengagumi diri sendiri, percaya diri berlebihan (*over confident*). Narsis sangat egosentris dan senang mencari perhatian.

Pada tingkat sosial, orang yang cenderung narsis merupakan manipulator terampil yang memicu dan memanfaatkan *impuls* narsis pada orang-orang di sekitar mereka. Narsisisme merupakan sikap yang dimiliki individu dalam mempertahankan dan meningkatkan penilaian yang tinggi atas dirinya (Campbell *et al.*, 2004). Narsisis cenderung kejam, kurang empati dan rasionalisasi persuasif untuk sistem kepercayaan (Lutus, 2007). Chatterjee dan Hambrick (2006) menyimpulkan bahwa narsisisme merupakan suatu hal yang menuntun seseorang dalam mengasumsikan posisi, kekuasaan (*power*) dan pengaruhnya (Kernberg, 1975). Selain itu, narsisisme berkaitan erat dengan harga diri, membantu seseorang dalam kemajuan profesionalnya (Raskin *et al.*, 1991). Pelaku narsis cenderung melakukan penilaian yang tinggi atas dirinya sendiri, baik kecerdasan, kreativitas, kompetensi, dan kemampuan dalam memimpin (John dan Robins, 1994). Oleh karena itu, dengan adanya narsisisme, seseorang berusaha menciptakan citra positif yang dapat menimbulkan optimisme dan keyakinan yang kuat atas hasil yang diperoleh nantinya. Menurut *American Psychiatric Association DSM-IV*, Narsisis adalah kekurangan empati yang tidak bersedia untuk mengenali atau mengidentifikasi dengan perasaan dan kebutuhan orang lain (masyarakat). Kurangnya empati merupakan salah satu fitur yang paling mencolok dari orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik.

Christopher Lasch dalam *the culture of narcissism*, melihat bahwa keberadaan narsisisme ini sangat berbahaya (Lasch, 1979). Narsisisme lebih banyak merayakan budaya permukaan dibandingkan budaya kedalaman. Rasionalitas yang dipakai adalah rasionalitas wajah, popularitas semu dan lain sebagainya. Narsisisme mengingkari budaya kedalaman (substansi). Persepsi tentang “saya” mengalami hiperbola sedemikian rupa dan menggerus habis persepsi

tentang “engkau” yang bukan "saya". Maka, persepsi tentang “kita” dan “kekitaan” menjadi kritis dan problematik, untuk tidak mengatakannya menjadi nihil (Rachman, 2009).

Pada konteks politik, perilaku politik yang asyik dengan diri sendiri oleh Piliang (2009), menyebutnya sebagai perilaku narsisisme politik (*politics narcissism*). Keberadaan narsisisme politik ini tentu berbahaya, karena lebih banyak menampilkan popularitas “wajah”, ketimbang hal-hal yang bersifat rasional dan substansi.

## **2.2 Konsep Altruisme**

Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan etika emas. Altruisme adalah lawan dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri. Menurut Baston (2002), altruisme adalah respon yang menimbulkan *positive feeling*, seperti empati. Seseorang yang altruis memiliki motivasi altruistik, keinginan untuk selalu menolong orang lain. Motivasi altruistik tersebut muncul karena ada alasan internal di dalam dirinya yang menimbulkan *positive feeling* sehingga dapat memunculkan tindakan untuk menolong orang lain. Alasan internal tersebut tidak akan memunculkan *egoistic motivation (egocentrism)*. Maka, tindakan altruistik pastilah selalu bersifat konstruktif, membangun, memperkembangkan dan menumbuhkan kehidupan sesama. Suatu tindakan altruistik tidak berhenti pada perbuatan itu sendiri, tetapi keberlanjutan tindakan itu sebagai produknya dan bukan sebagai kebergantungan.

Pada titik tertinggi, *empathic concern* didesain sebagai bentuk motivasi altruistik. Dalam pandangan Batson *et al.* (1991), sebagai “*an other-oriented emotional respons congruent...welfare of another person*” fokusnya adalah simpati terhadap kesulitan orang lain (masyarakat) dan motivasi untuk mengurangi kesulitan tersebut. Dalam skala pengukur (angket) *empathic concern*, yang dimasukkan sebagai sifat-sifat yang merefleksikan hal ini adalah simpati, belas kasihan, gerakan hati, tidak sampai hati, dan kesabaran dalam menghadapi orang lain yang kesulitan. Empati “*feeling in*” dilakukan dengan cara masuk ke dalam kondisi emosional (perasaan) orang lain (masyarakat), dengan ciri; proses terjadi lebih mendalam, didasarkan pada penerimaan perbedaan individu, merupakan upaya-upaya pemahaman terhadap kondisi orang lain dan berbasis pada faktor-faktor kognitif dan afektif.

## **2.3 Politik Penganggaran Daerah: Ruang dan Akses Kepentingan Masyarakat**

Politik Anggaran menurut Wildavsky (1985), adalah, ”*All budgeting is about politics; most politics is about budgeting; and budgeting must therefore be understood as part of political game.* Sebagai alat politik, anggaran sektor publik digunakan untuk memotivasi dukungan untuk pencapaian tujuan pemerintah. Sifat penganggaran terlepas dari ukuran, kompleksitas, dan sektoral sangat bergantung pada sistem anggaran dalam mencapai tujuan strategis. Hopwood (1974), bahwa aspek perilaku dan sosial merupakan bagian integral dari proses penganggaran dan tidak boleh dipisahkan dari sisi teknis.

Jim St. George dari *Internasional Budget Project (IBP)* Washington, menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan anggaran yaitu pertama-tama harus ditujukan untuk menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar manusia, seperti hak atas ekonomi, sosial dan budaya yang semuanya dapat dilahirkan dari konsensus bangsa. Dengan demikian yang terpenting dari proses kebijakan adalah keberpihakan kebijakan tersebut di arahkan kepada siapa (Bandung Institute of Governance Studies, BIGS, 2003).

Karya klasik Key (1940), sudah mengingatkan bahwa reformasi anggaran bukan sekadar membuat *better budget*, tetapi yang lebih penting harus melihat dimensi politik anggaran, terutama “siapa memperoleh apa” (*who gets what*). Pembicaraan tentang “siapa memperoleh apa” itu mencakup dua fungsi anggaran, yakni distribusi dan alokasi. Kedua fungsi ini tentu tidak hanya berbicara mengenai perhitungan secara teknokratik, tetapi juga secara politik. Pembicaraan tentang “siapa memperoleh apa” akan memunculkan pertanyaan untuk kepentingan siapa *better budget*? Apakah *better budget* mempunyai kontribusi secara langsung dan nyata pada pembangunan kesejahteraan maupun pengurangan kemiskinan? Apakah anggaran yang canggih berguna bagi kelompok-kelompok marginal (kaum miskin, perempuan, difabel, kaum tani, buruh dan seterusnya), baik dalam bentuk redistribusi anggaran untuk mereka maupun akses mereka terhadap anggaran?

Musrenbang sebagai mekanisme awal menjaring kepentingan masyarakat hanya melibatkan “elit masyarakat” dan sebagai prosedur “ritual” untuk memenuhi persyaratan atau paling tidak untuk melegitimasi setiap usulan dalam anggaran daerah. Hasil penelitian Sopanah *et al.* (2013), menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, namun jika dikaitkan dengan makna dan hakikat partisipasi sesungguhnya mekanisme partisipasi yang ada masih sebatas formalitas (*ceremonial budgeting*) dan partisipasi masyarakat masih dianggap semu atau “*sebuah keindahan yang menipu*”. Begitupula mekanisme reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) hanya melibatkan

“pendukung/konstituen” dan belum berdampak luas kepada masyarakat, karena aspirasi masyarakat justru berujung pada pemenuhan kepentingan anggota dewan dan konstituen tertentu.

Dengan demikian dibutuhkan model politik anggaran daerah dimana “masyarakat” menjadi pusat episentrum dari seluruh proses penganggaran daerah. Orientasi masyarakat bukan hanya menjadi bentuk “simpati” tetapi menjadi bentuk “empati” untuk menjalankan amanah sebagai wakil dan pelayan masyarakat. Motivasi yang lebih bersifat egoistik “narsisisme” harus didorong pada pencapaian *empathic concern* yang merupakan respon dari motivasi altruistic, dimana kepentingan masyarakat menjadi jantung dari politik anggaran daerah.

## 2.4 Studi Pendahuluan

Untuk mencapai target penelitian ini beberapa penelitian pendahuluan yang telah dilakukan antara lain; hasil penelitian Pasoloran (2015a) menunjukkan bahwa narsisisme dalam penganggaran daerah dapat diamati melalui kebijakan yang mengatasnamakan masyarakat yang diciptakan oleh aktor penganggaran daerah seperti dana aspirasi masyarakat. Dana aspirasi telah digunakan sebagai sarana *impression* seolah-olah peduli dengan masyarakat dan telah menjadi simularka politik anggaran dan telah “terputus” dari akar budayanya (*loss of culture*) bahwa anggaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dana aspirasi masyarakat telah menjadi simularka yang menghasilkan semua yang palsu, menyimpang dari rujukan dan menciptakan tanda sebagai topeng, kamufase, atau fatamorgana.

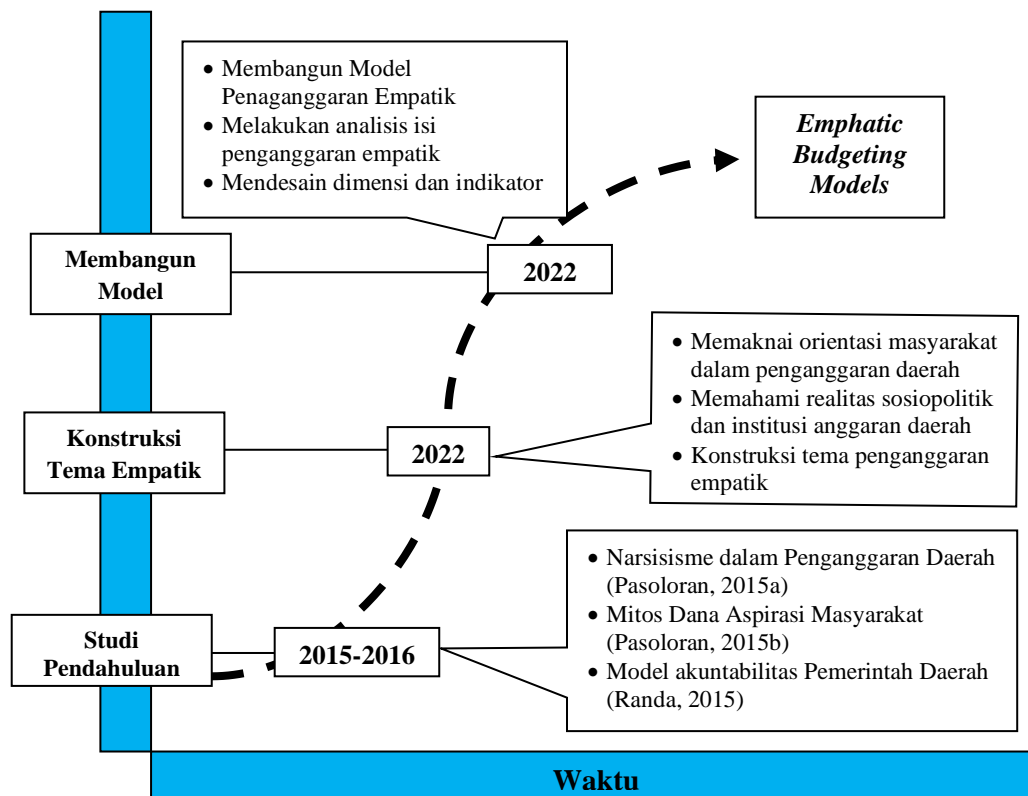
Penelitian lanjutan dengan menggunakan metode etno-semiotika menunjukkan bahwa dana aspirasi masyarakat dalam penganggaran daerah menjadi mitos yang seolah-olah sangat “natural” sebagai pemenuhan kewajiban “suci” aktor anggaran, namun dibalik itu ada motivasi *selfish*, oportunis, pragmatis untuk kepentingan diri sendiri, politik, dan pencitraan (Pasoloran, 2015b). Hasil penelitian Randa (2015) juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai agen lebih banyak mengedepankan akuntabilitas managerial dan kurang mengedepankan akuntabilitas publik yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dan anggota organisasi sebagai prinsipal dalam proses akuntabilitas untuk mempertahankan legitimasi yang diperolehnya.

Sebagai keberlanjutan dari penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan dengan dua tahapan yaitu; tahap pertama, mengkonstruksi tema empatik penganggaran daerah dengan memaknai orientasi masyarakat dalam penganggaran daerah dan memahami relasi sosiopolitik dan institusi anggaran daerah dengan pendekatan kuantitatif (fenomenologi). Tahap kedua adalah

membangun model penganggaran empatik dan mendesain dimensi dan indikator empatik penganggaran daerah.

## 2.5 Peta Jalan Penelitian

Untuk menggambarkan penelitian secara utuh berikut ini adalah peta jalan (*road map*) penelitian sebagai berikut:



Gambar 1  
Peta Jalan (Road Map) Penelitian

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pada tahap pertama, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif (interpretif) dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk memaknai tema empatik melalui pengembangan konsep narsisisme dan altruisme serta untuk memahami realitas sosial dibalik penganggaran daerah melalui dua tingkat analisis, yaitu: pertama, analisis makro, yang berkaitan dengan konteks relasi sosiopolitik dan institusi di balik anggaran daerah. Kedua, analisis mikro, menyangkut pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berhadapan dengan penganggaran daerah.

Pada tahap berikutnya menggunakan paradigma kuantitatif. Tahap kedua penelitian ini menggunakan pendekatan *Content Analysis* untuk mengidentifikasi aspek-aspek empatik dalam penganggaran daerah.

### 3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan melalui menyusun model penganggaran empatik. Hasil temuan penelitian pada tahap pertama berupa konstruksi tema yang menjadi esensi empatik digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan, program dan kegiatan pada anggaran daerah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 9 tahapan langkah:

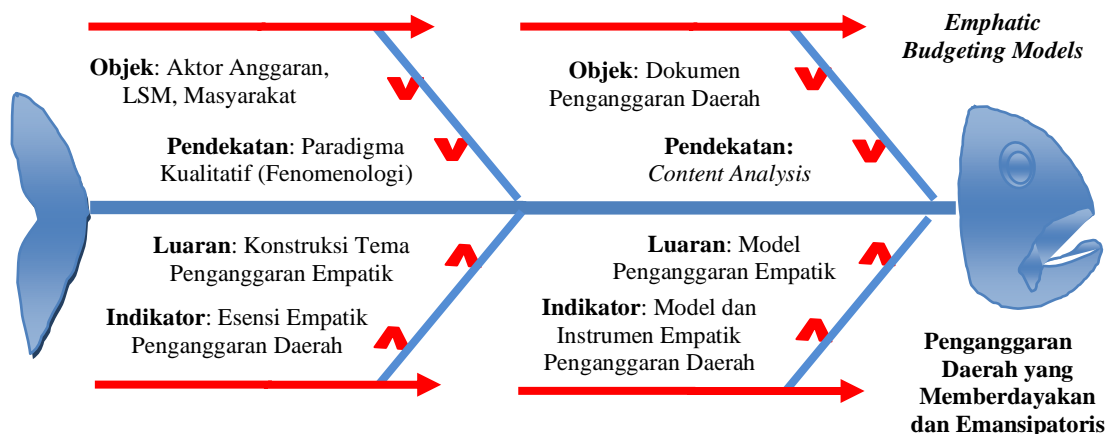
- 1) Merumuskan kembali esensi empatik berdasarkan konstruksi tema yang diperoleh dari hasil penelitian tahap pertama.
- 2) Membangun model penganggaran empatik (*emphatic budgeting model*).
- 3) Melakukan observasi awal terhadap dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan dokumen penganggaran daerah (KUA-PPAS, RKA-SKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai objek penelitian.
- 4) Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih.
- 5) Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis.
- 6) Pendataan sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean.
- 7) Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria empatik untuk pengumpulan data.
- 8) Mendesain dan memvalidasi dimensi dan indikator yang terkait dengan esensi empatik.
- 9) Penyempurnaan Model Penganggaran Empatik

Model penganggaran empatik (*emphatic budgeting model*) sebagai luaran penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif model penganggaran yang dapat digunakan untuk

menilai sejauhmana orientasi kepentingan masyarakat dalam penganggaran daerah. Indikatornya adalah konten orientasi kepentingan masyarakat dari setiap komponen program dan anggaran daerah.

### 3.3 Kerangka Alur Penelitian

Penelitian ini disusun sejalan dengan rencana tahapan penelitian yang meliputi tahap pertama melakukan kajian teoritik melalui pemaknaan dan pemahaman terhadap orientasi masyarakat dalam kebijakan anggaran daerah. Pada tahap ini digunakan pendekatan paradigma kualitatif dengan kajian fenomenologi melalui wawancara mendalam dengan informan kunci pada pemerintah daerah, DPRD, LSM, tokoh masyarakat dan akademisi dengan luaran berupa konstruksi tema-tema empatik dalam penganggaran daerah. Pada tahap kedua penelitian membangun model empatik dengan pendekatan *content analysis* pada dokumen penganggaran daerah.



Gambar 2  
Kerangka Alur Penelitian

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



#### 4.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Penyusunan dokumen RPJMD merupakan hal yang krusial untuk dipahami karena pada dokumen inilah visi-misi kepala daerah diturunkan ke level operasional agar bisa diintegrasikan ke dalam program-program pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang komprehensif akan mampu menurunkan tataran konseptual visi-misi kepala daerah ke tataran operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah, program perangkat daerah, serta indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah.

Sebagai pemegang mandat kekuasaan daerah, kepala daerah berkewajiban untuk menjejahterakan masyarakat dan memajukan daerah sesuai dengan visi-misi yang dijanjikan pada masa kampanye pilkada. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi dirumuskan oleh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

**Tabel 1**  
**Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja**  
**Periode 2021-2026**

No.	Indikator Visi	Penjelasan Indikator
1	Bangit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemulihan kehidupan social-ekonomi masyarakat dan perekonomian daerah</li><li>• Berkurangnya masyarakat miskin, produktivitas dan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, pendidikan dan kesehatan, akses masyarakat terhadap pelayanan publik, keamanan dan kenyamanan.</li></ul>
2	Produktif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan potensi unggulan; pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan perikanan air tawar</li><li>• Potensi ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor jasa</li></ul>
3	Tangguh	<ul style="list-style-type: none"><li>• Munculnya prakarsa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong royong, kemampuan beradaptasi, tanggap terhadap perubahan social-ekonomi-ekologi</li><li>• Kualitas kehidupan kerohanian, kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiawanan social, rukun dan toleran</li></ul>

Rumusan visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2021-2026 menunjukkan orientasi yang sepenuhnya diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Indikator visi yaitu; bangkit, produktif dan tangguh menunjukkan visi yang sangat strategis bagaimana pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja dapat menghadapi tantangan perubahan yang sangat dinamis dan pada satu sisi memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi-misi itulah yang meyakinkan masyarakat untuk memberi mandat kepada kandidat tersebut untuk menjadi kepala daerah.

**Tabel 2**  
**Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja**  
**Periode 2021-2026**

No.	Indikator Misi
1	Optimalisasi tata kelola pemerintahan
2	Optimalisasi pelayanan kesehatan
3	Peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan
4	Pemulihan roda perekonomian dan pemberdayaan usaha masyarakat
5	Pengembangan potensi pariwisata revitalisasi kearifan adat-budaya
6	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasana publik vital
7	Penguatan peran seluruh elemen masyarakat

Rumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2021-2026 sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi paling tidak menunjukkan tiga hal yaitu; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur dan partisipasi masyarakat.

#### **4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi

dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

**Tabel 3**  
**Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja**  
**Periode 2021-2026**

No.	Isu Strategis	Indikator
1	Tata kelolah pemerintahaan dan pelayanan publik	Reformasi birokrasi
2	Pembangunan SDM	Akses kebutuhan dasar; pendidikan dan kesehatan
3	Pembangunan ekonomi berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi
4	Kesejahteraan masyarakat	Pengentasan masalah kesejahteraan sosial dan gini rasio
5	Peningkatan kontribusi parawisata terhadap perekonomian daerah	Pengembangan sector parawisata
6	Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur
7	Menurunnya nilai budi pekerti	Kasus kriminal

Isu strategis seperti yang digambarkan pada tabel 3. Menunjukkan isu-isu yang dikembangkan dari 7 (tujuh) rumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari; tata kelola pemerintahan, pengembangan SDM (pendidikan dan kesehatan), ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, parawisata, infrastruktur dan budi pekerti. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Rumusan isu strategis daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal, baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

### 4.3 Prioritas Pembangunan Yang Berorientasi Kepentingan Masyarakat

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

**Tabel 4**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja**  
**Periode 2021-2026**

No	Program Prioritas	Program Orientasi Masyarakat	
		Langsung	Tidak Langsung
1	Mengotimalkan tata kelola pemerintahan	-	17
2	Optimalisasi pelayanan kesehatan	9	3
3	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	6	7
4	Pemberdayaan usaha masyarakat	18	17
5	Mengembangkan potensi parawisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	3	18
6	Menguatkan interkonektivitas antar wilayah	-	14
7	Mewujudkan tata kehidupan social yang harmonis, toleran dan saling menghormati	9	3
		45	79

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2021-2026 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4, terdapat 124 program prioritas yang dikembangkan dari misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dari keseluruhan program prioritas terdapat 45

program yang dianggap berorientasi secara langsung terhadap masyarakat dan 79 program prioritas yang dianggap sebagai program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Program tersebut adalah program yang terkait dengan pengembangan birokrasi dan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung. Program prioritas diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

#### **4.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rancangan rencana kerja Bappeda Kabupaten Tana Toraja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja di kecamatan. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Dokumen RKPD sebagai dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan atau program kerja tahunan pemerintah daerah. Proses penurunan program pembangunan daerah di RPJMD menjadi kegiatan atau program tahunan ini krusial dilakukan karena akan berdampak pada kebijakan yang akan diterima oleh masyarakat. Penyusunan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan program-program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah melalui pilihan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Program yang ada dalam RPJMD menjadi sumber data dan informasi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen RKPD maupun dalam rencana strategis perangkat daerah.

Rencana pembangunan Daerah harus memenuhi kaidah secara partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Bappeda usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Musrenbang sebagai mekanisme awal menjangking kepentingan masyarakat hanya melibatkan “elit masyarakat” dan sebagai prosedur “ritual” untuk memenuhi persyaratan atau paling tidak untuk melegitimasi setiap usulan dalam anggaran daerah. Hasil penelitian Sopanah *et al.* (2013), menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, namun jika dikaitkan dengan makna dan hakikat partisipasi sesungguhnya mekanisme partisipasi yang ada masih sebatas formalitas (*ceremonial budgeting*) dan partisipasi masyarakat masih dianggap semu atau “*sebuah keindahan yang menipu*”. Begitu pula mekanisme reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjangking aspirasi masyarakat (jaring asmara) hanya melibatkan “pendukung/konstituen” dan belum berdampak luas kepada masyarakat, karena aspirasi masyarakat justru berujung pada pemenuhan kepentingan anggota dewan dan konstituen tertentu.

#### Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Setelah penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan kegiatan atau program tahunan pemerintah daerah, selanjutnya dilakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyusun kerangka pendanaan kegiatan dan program tahunan tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun atau biasanya disebut satu tahun anggaran. APBD berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengeluaran yang dibiayai APBD adalah belanja-belanja yang dianggarkan sebagai pos pengeluaran APBD.

Kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pemberian pagu anggaran bagi masing-masing perangkat daerah.

#### **Tabel 5**

#### **Ringkasan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase (%)</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
Pendapat Asli Daerah	125.500.000.000	11
Pendapatan Transfer	1.010.206.349.000	86
Lain-lainPendapatan Yang sah	34.965.000.000	3
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.170.671.349.000</b>	
<b>BELANJA DAERAH</b>		
Belanja Operasi	770.936.371.903	66
Belanja Modal	215.145.279.097	18
Belanja Tak Terduga	18.000.000.000	2
Belanja Transfer	166.589.698.000	14
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.170.671.349.000</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>0</b>	

Ringkasan APBD pada tabel 5 menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar 86%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berkisar 11%. Untuk mendorong potensi dan pengembangan ekonomi masyarakat seperti yang disebutkan dalam visi, misi serta program prioritas, dalam mendorong pendanaan pembangunan daerah, maka peningkatan PAD menjadi sangat strategis. Peningkatan PAD akan memberikan dampak ganda (multiefek) karena peningkatan PAD adalah cerminan pergerakan ekonomi rill daerah.

Pada sisi belanja yang sekaligus menunjukkan kerangka pendanaan pembangunan daerah menunjukkan bahwa sebgaaian besar belanja dialokasikan pada belanja operasional yang sebgaaian besar merupakan komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar 66%. Belanja modal yang dialokasikan untuk belanja asset daerag dan infrastruktur sebesar 18%. Komposisi ini menunjukkan masih terbatasnya kemampuan pendanaan daerah dalam merealisasikan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat seperti yang diabstraksi dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pemebangunan daerah Kabupaten Tana Toraja.

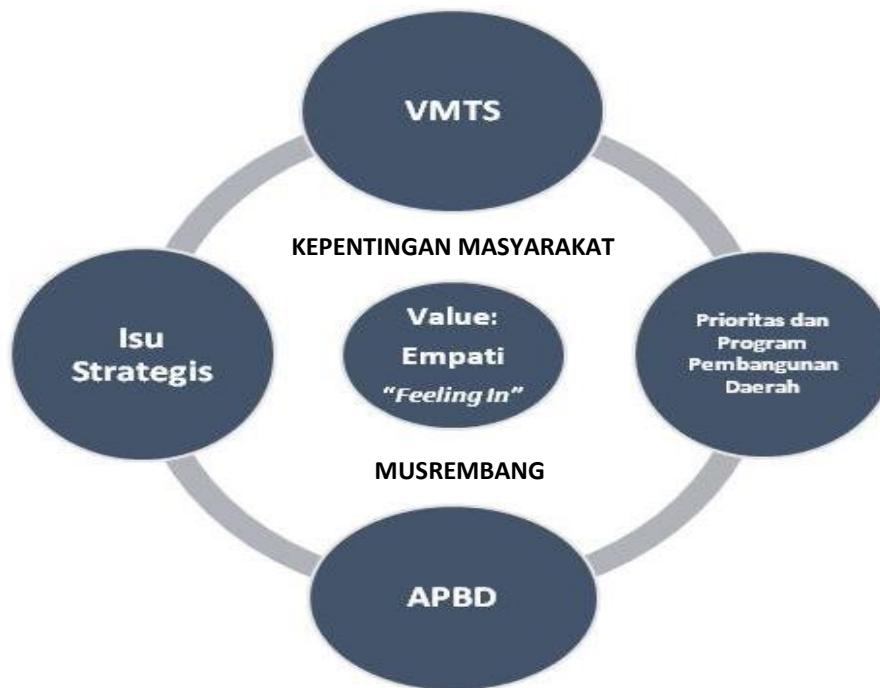
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seharusnya dialokasikan untuk membiayai program prioritas belanja wajib dan belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

#### **4.5 Model Penganggaran Empatik**

Dasar pemahaman terhadap pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengerahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabdikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat. Proposisi tersebut mengindikasikan bahwa inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.

Melalui partisipasi kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan substansi dari anggaran daerah dan selanjutnya menjadi amanah bagi para aktor anggaran untuk menentukan apa yang harus "dikerjakan" dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya bukan hanya sebagai ritual belaka dan menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan mereka. Partisipasi juga bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai "obyek", melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan atau proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai "subyek" utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Sebab itu gerakan pemberdayaan menilai tinggi dan mempertimbangkan inisiatif dan perbedaan lokal. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan gerakan sosial, dimana semua pemangku kepentingan daerah terlibat dalam memperjuangkan anggaran daerah yang memberdayakan dan emansipatoris. Semua elemen masyarakat menumbuhkan kesadaran untuk terlibat bersama-sama pembangunan daerah menuju cita-cita dan pencapaian tujuan dan keutamaan nilai. Pemberdayaan adalah proses yang berkelanjutan yang memperkuat kapasitas untuk bertindak berhasil dalam mengubah keadaan.





**Gambar 1**  
**Model Penganggaran Empatik**

Dengan demikian, penganggaran daerah mestinya dapat diperkaya dan diubah menjadi sebuah konstruksi sosial yang lebih memberdayakan dan emansipatoris jika “cinta” menjadi sentral dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menjadi suatu kesadaran atau menjadi sesuatu yang benar-benar sangat diperlukan untuk "tindakan yang benar" dan "kehidupan yang lebih baik" dan sebagai sebuah hasil kecakapan manusia yang mendasar dan potensi yang dapat disadari, dibudidayakan dan diperdalam melalui praktik (Caiden, 1985) Walaupun penganggaran daerah dalam bentuk dan fungsi sosialnya bersifat progresif dan memberdayakan, namun sebagai praktik sosial juga telah menunjukkan adanya berbagai penyimpangan dalam bentuk distorsi dan disintegrasi “kasih” dalam praktiknya. Harapannya, anggaran daerah dapat kembali berorientasi sepanjang garis yang lebih emansipatoris dan memberdayakan dengan mengedepankan beberapa cara di mana “kesejahteraan masyarakat” menjadi tujuan dasarnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

:

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) rumusan visi dan misi yang merupakan konsepsi abstrak dari Kepala Daerah terpilih menunjukkan konten yang jelas tentang orientasi kesejahteraan masyarakat, namun dalam proses perencanaan daerah orientasi tentang kepentingan masyarakat semakin berkurang. Proses musrembang yang diharapkan dapat mendorong partisipasi dan kebutuhan masyarakat harus berhadapan dengan ketidakmapuan pendanaan daerah yang sebagian besar dialokasi untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja asset lainnya. Sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah yang merepresentasikan pergerakan ekonomi riil daerah juga masih sangat terbatas, (2) model penganggaran daerah seharusnya dapat berorientasi sepanjang garis yang lebih emansipatoris dan memberdayakan dengan mengedepankan beberapa cara di mana “kesejahteraan masyarakat” menjadi tujuan dasarnya. Empati “*feeling in*” dilakukan dengan cara masuk ke dalam kondisi emosional (perasaan) orang lain (masyarakat), dengan ciri; proses terjadi lebih mendalam, didasarkan pada penerimaan perbedaan individu, merupakan upaya-upaya pemahaman terhadap kondisi orang lain dan berbasis pada faktor-faktor kognitif dan afektif.

**BAB VI**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**4.1 Anggaran Biaya**

Prakiraan biaya penelitian adalah Rp.80.000.000,-

**4.2 Jadwal Pelaksanaan**

Pelaksanaan penelitian adalah dua tahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Tahun 2022									
		1,2,	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Prapenelitian										
2	Observasi dan wawancara										
3	Membuat manuskrip										
4	Pengumpulan dan tabulasi data										
8	Membangun Model Penganggaran Empatik										
9	Observasi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah										
10	Sampling dan kategori data										
11	Desain dan validasi dimensi dan indikator										
12	Penyempurnaan/Penerapan model										
13	Pembuatan laporan dan diseminasi										

## DAFTAR PUSTAKA

- Batson, C. D. 2002. Addressing the Altruism Question Experimentally. In S. G. Post, L. G. Underwood, J. P. Schloss, & W. B. Hurlburt (Eds.), *Altruism and Altruistic Love*. New York: Oxford University Press.
- Batson, C. D., Burris, C. T., Wagoner, K. C., dan Wolgast, B. M. 1991. Is Intrinsic Religion Used to Meet Personal Needs. *Paper presented at the Society for the Scientific Study of Religion Convention*, Pittsburgh, Pennsylvania.
- Caiden N. 1988. *Shaping Things to Come: Super-Budgeters as Heroes (Heroines) in The Late-Twentieth Century*. In *New Directions in Budget History*, Rubin I (ed.). State University of New York Press: New York; 43–58.
- Campbell, W.K., Bonacci, A.M., Shelton, J., Exline, J.J., & Bushman, B.J., 2004. Psychological Entitlement: Interpersonal Consequences and Validation of a New Self-Report Measure. *Journal of Personality Assessment*, 83, 29-45.
- Chatterjee, A. dan Hambrick, D.C. 2006. It's All About Me: Narcissistic Chief Executive officers and Their Effects on Company Strategy and Performance, *Administrative Science Quarterly* 52, 351-386.
- Hopwood, A.G. 1974. Leadership Climate and the Use of Accounting Data in Performance Evaluation, *The Accounting Review* 49 (3): 485-495.
- John, O.P. dan Robins, R. W. 1994. Accuracy and Bias in Self-Perception: Individual Differences in Self-Enhancement and The Role of Narcissism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 206-219
- Kets de Vries, M.F.R. dan Miller, D. 1985. Narcissism and Leadership - an Object Relations Perspective. *Human Relations* 38 (6):583-601.
- Kernberg, O. 1975. *Borderline Conditions and Pathological Narcissism*. New York: Jason Aronson.
- Key, V. O. 1940. The lack of a budget theory' *American Political Science Review* 34 (6), 1137-1144.
- Lasch, C. 1979. *The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations*. New York: W. W. Norton.
- Lutus, Paul, 2007. Social Narcissism, The Variety and Persistence of Human Self-Deception <http://www.arachnoid.com/opi>
- Pasoloran, O. 2015a. Narcissism In Local Budgeting: The Mirror And Mask Effects Of Public Aspiration Fund. *International Journal of Accounting and Business Society (IJABS)* 23 (1), 73-95.
- Pasoloran, O. 2015b. Myth Of Public Aspiration Fund: Ethno-Semiotics Study On Local Government Budgeting. *International Journal of Management Research and Business Strategy (IJMRBS)*. 4(4), 1-10.
- Piliang, Y. A. 2009. Simulakra Politik (online), <http://taitaiberacun.wordpress.com/2009/06/05/narsisme-politik/>

- Randa, F. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization : from Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, 665-672.
- Rachman, A. 2009. Demokrasi, Narsisme dan Keaksaraan Budaya. Makalah pada *Workshop Penguatan Kapasitas Gerakan Antariman*, diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 22-27 Juni 2009.
- Raskin, R., Novacek, J. dan Hogan, R. 1991. Narcissism, Self-Esteem, and Defensive Self-enhancement. *Journal of Personality*, 59, 20-38.
- Sopanah, Ana., Made Sudarma., Unti Ludigdo., Ali Djamhuri. 2013. Beyond Ceremony: The Impact of Local Wisdom on Public Participation in Local Government Budgeting *The Journal Of Applied Management Accounting Research Vol. 11 · No. 1 2013*.
- Tribun online. 2 November 2014. ACC: Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Jeneponto Mandek 2 Tahun. <http://makassar.tribunnews.com>, diakses 1 Desember 2014
- Wildavsky, Aaron. 1985. *A Comparative Theory of Budgetary Processes*. New Brunswick, NJ: Transaction Books.

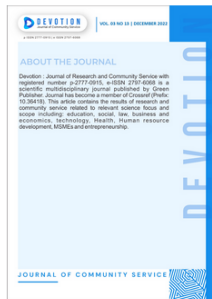
Section Articles

Empatic Budgeting Model: Study of Regional Budgeting In Tana Toraja Regency

https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.290

Oktavianus Pasoloran  
pasolorano@gmail.com (Primary Contact)  
Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Lisa Kurniasari Wibisono  
Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia



Download

PDF HTML

Abstract

This study aims to produce empathic budgeting models that are built through the concept of altruism. With this model, regional budgets are built into a result of social construction that is full of values, empowering, emancipatory, and that regional budgeting is dedicated to the welfare of the community. This study uses a content analysis approach to find out or explain the content of community interests in the regional budgeting of Tana Toraja Regency. The results of this study indicate that; (1) the formulation of the vision and mission shows clear content regarding the orientation of community welfare, but in the regional planning process the orientation towards community interests is decreasing. The musrembang process, which is expected to encourage community participation and needs, has to deal with the inability of regional funding, which is mostly allocated for personnel expenditures, goods and services, and other asset expenditures. (2) the regional budget budgeting model should be oriented along lines that are more emancipatory and empowering by prioritizing several ways in which 'community welfare' is its basic objective. Budgetary actors who are involved in the regional budgeting process must have 'feeling in' empathy which is done by entering into the emotional state (feelings) of the community through a deeper understanding of the community's condition. Thus the empathic budgeting model is expected to provide broad implications in understanding community orientation in regional budgeting



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

## Lampiran Biodata Peneliti

### KetuaPeneliti

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Oktavianus Pasoloran, SE.,MSi, Akt, CA
2	JenisKelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK	9505013027
5	NIDN	0926106801
6	Tempat/ Tanggal Lahir	Tana Toraja/ 26 Oktober 1968
7	Telepon/Fax/HP	081 355 619 844
8	E-mail	pasolorano@yahoo.com
9	Alamat Kantor	Jl. Tanjung Alang No 23 Makassar
10	Telepon/Fax	0411-871038, 871733/ 0411- 870294
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 356 orang S-2 = 0 S3= 0
12	Mata Kuliah yang diampuh	1. Teori Akuntansi 2. Akuntansi Keuangan Lanjutan 3. Akuntansi Sosial dan Lingkungan 4. Metodologi Penelitian

#### B. Editorial/Reviewer Jurnal Ilmiah

No.	Tahun/ Periode	Editorial/Reviewer Jurnal Ilmiah
1	2003 - Sekarang	Founder/Ketua Dewan Redaksi/Reviewer Jurnal SIMAK (Sistem Informasi, Manajemen dan Akuntansi): <a href="http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/simak">http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/simak</a>
2	2005 - Sekarang	Anggota Dewan Redaksi Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat <a href="http://adl.apatik.or.id/default.aspx?tabID=52&amp;pbit=%22Lembaga+Penelitian+Universitas+Atma+Jaya+Makassar%22">http://adl.apatik.or.id/default.aspx?tabID=52&amp;pbit=%22Lembaga+Penelitian+Universitas+Atma+Jaya+Makassar%22</a>
3	2018	<i>Editorial Board</i> AJAR ( <i>Atma Jaya Accounting Research</i> ) : <a href="http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/AJAR">http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/AJAR</a>
4	2019	Reviewer Accounting Profession Journal (APaJi) Universitas Kristen Indonesia Paulus: <a href="http://ojsapaji.org/index.php/apaji">http://ojsapaji.org/index.php/apaji</a>

### C. Perolehan HKTI

No.	Tahun	Judul
1	2019	Pemegang Hak Paten: Model Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah Daerah

### D. Buku

No.	Judul Buku	Keterangan
1	Akuntansi Untuk Organisasi Gereja: Pembaharuan Penalayanan Keuangan Gereja dalam Mewujudkan <i>Good Church Governance</i>	<i>Siap Cetak</i>
2	Narsisisme dalam Penganggaran Daerah	<i>Dalam Proses Penyusunan</i>

### E. Jurnal Internasional

No	Judul	Volume/ Nomor /Tahun	Penerbit/ Jurnal
1	<i>Narcissism In Local Budgeting: The Mirror And Mask Effects Of Public Aspiration Fund</i>	Volume 23, Number 1, August 2015	<i>International Journal of Accounting and Business Society (IJABS)</i>
2	<i>Myth Of Public Aspiration Fund: Ethno-Semiotics Study On Local Government Budgeting</i>	Vol. 4, No. 4, October 2015	<i>International Journal of Management Research and Business Strategy (IJMRBS)</i>

### F. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI



No.	Tahun/ Skema Sumber Dana	Nama Judul
1	2016/ PDUPT DIKTI	Membangun Model Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik: Dari Akuntabilitas Managerial Ke Akuntabilitas Publik (Studi Kualitatif Naturalistik pada Sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan)
2	2017/ KKN-PPM DIKTI	Pemberdayaan Kelompok Tani “Donda” Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Pango-Pango Melalui Peremajaan Kebun Kopi , Penanaman Tamarello Dan Penataan Kebun Masyarakat
3	2018-2019/ PDUPT DIKTI	Implementasi Model Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan pengajuan penelitian kompetisi internal UKI Toraja.



**Dr. Oktavianus Pasoloran,SE.,Msi.,Ak.,CA**